

## **POLA HUBUNGAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**H. Ahmad Maki**

**Gunawan**

**Sofyan Sauri**

**Sri Handayani**

**Universitas Islam Nusantara Bandung**

[\*\*makki@gmail.com\*\*](mailto:makki@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implikasinya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Juga, melakukan perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme. Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan. Namun demikian, mutu pendidikan dan kualitas SDM di negara kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Sampai saat ini, lemahnya kualitas SDM masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan dan daya saing bangsa. hal tersebut menyebabkan rendahnya daya saing global bangsa Indonesia. Padahal, akselerasi arus globalisasi dan semakin terbukanya pasar dunia, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin luas dan ketat.*

*Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan*

### **Abstract**

*Education policy is a product that is used as a guide for legal-neutral educational decision-making and is adapted to a moderate educational environment. The function of educational policy is that educational policies are made to be a guide in acting, directing activities in education or organizations or schools with the community and government to achieve the goals that have been set. The implication is the granting of greater authority to districts and cities to manage primary and secondary education in accordance with the potential and needs of the region. Also, carry out institutional changes to meet and improve efficiency and effectiveness in planning and implementation, as well as empowering human resources, which emphasizes professionalism. The importance of quality education is increasingly being realized, because the creation of human quality and the quality of an advanced and independent Indonesian society can only be realized if public education is successfully improved. However, the quality of education and the quality of human resources in our country is still far behind compared to ASEAN countries, especially when compared to developed countries. Until now, the weak quality of human resources is still a major problem in the development and competitiveness of the nation. This causes the low global competitiveness of the Indonesian nation. In fact, due to the acceleration of globalization and the increasingly open world market, Indonesia is faced with increasingly broad and tight competition.*

*Keywords: Policy, Educational and Cultural Development*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*). Terorganisir memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.<sup>1</sup>

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) adalah suatu keniscayaan, melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu row input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa "...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Merujuk kepada petikan pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sektor pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak Negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan. Di era globalisasi ini, pendidikan masih dianggap sebagai kekuatan utama dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan. Namun demikian, mutu pendidikan dan kualitas SDM di negara kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Sampai saat ini, lemahnya kualitas SDM masih

---

<sup>1</sup> Sofyan Sauri, "Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu," *UPI Bandung*, 2008, h. 1.

menjadi permasalahan utama dalam pembangunan dan daya saing bangsa. hal tersebut menyebabkan rendahnya daya saing global bangsa Indonesia. Padahal, akselerasi arus globalisasi dan semakin terbukanya pasar dunia, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin luas dan ketat.<sup>2</sup>

Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidaklah semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal (*internal efficiency*), tetapi bahkan yang lebih penting adalah menyangkut bagaimanakah meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain (*external efficiency*). Pembangunan sistem pendidikan tidak seharusnya hanya ditujukan pada pengembangan pendidikan sebagai sistem tersendiri, tetapi juga pengembangan sistem pendidikan sebagai salah satu sistem atau bagian yang integral dari sistem lain yang lebih luas. Dengan demikian pembangunan sistem pendidikan harus mampu memberikan arti fungsional bagi pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Masalah yang sering muncul dalam konteks Kebijakan Pendidikan Nasional adalah, pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Kebijakan Pendidikan itu sendiri, apa saja karakteristik kebijakan pendidikan, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, dan bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional di Indonesia

Landasan kebijakan dalam pembangunan pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan pendidikan.<sup>4</sup> Oleh sebab itu landasan tersebut biasanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara, kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan

---

<sup>2</sup> Sauri, h. 1.

<sup>3</sup> Suroto, "Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia dan Kendala yang Dihadapi sebagai Upaya Perbaikan dalam Rangka Mempersiapkan Warga Negara Muda yang Baik dan Cerdas," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (13 Mei 2016): h. 496.

<sup>4</sup> Angelika Bule Tawa, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar," *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 2 (29 November 2019): h. 109.

oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu sangat jelas bahwa kebijakan pembangunan pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum, antara lain: a) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. b) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan.

Dari uraian latar belakang maka makalah ini mengemukakan pembahasan dengan judul: **“Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan”**.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>5</sup>

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang kemudian direduksi, didisplay dan diverifikasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017), h. 6.

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

1. Analisis Konten Analisis konten (content analysis) atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Pendapat lain menjelaskan bahwa analisis konten (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.<sup>7</sup> Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
2. Analisis Induktif Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>8</sup>
3. Deskriptif Analitik Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal. Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk mengungkapkan relevansi konsep pendidikan berbasis pengalaman dalam buku *Experience and Education* karya John Dewey yang telah didapat sebelumnya dalam pendidikan Islam.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pembangunan

Banyak definisi tentang konsep kebijakan. Di antaranya ialah kebijakan sebagai apa saja yang hendak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>10</sup> Pendapat lain mendefinisikan kebijakan sebagai suatu pola tingkah laku yang terarah kepada tujuan yang diikuti oleh seseorang atau beberapa orang dalam menangani suatu masalah. Pola tingkah laku yang terarah kepada tujuan berhubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan adalah kebijakan adalah sesuatu yang gelap dan abstrak yang mendorong kepada keputusan-keputusan selanjutnya.<sup>11</sup>

Banyak peneliti lain berpendapat bahwa tidak mungkin memberikan satu definisi saja atas kebijakan. Mereka yakin bahwa perlu mendaftarkan berbagai elemen dan pengertian-pengertian

---

<sup>7</sup> Onong Uchajana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 335.

<sup>9</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

<sup>10</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1978), h. 3.

<sup>11</sup> James E. Anderson, *Public Policy Making* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), h. 3.

lain mengenai kebijakan, seperti tujuan-tujuan dan implementasi program-program, atau pemikiran-pemikiran sebagai bermacam-macam aspek keuntungan langsung dan tidak langsung serta biaya kebijakan.<sup>12</sup>

Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), perumusan, dan pengesahan tujuan dan program, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.<sup>13</sup> Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.<sup>15</sup>

## 2. Pembangunan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Salah satu faktor penentu bagi kelestarian dan kemajuan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar media dalam menyampaikan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan dapat menghasilkan perubahan dan pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Keberhasilan program pendidikan dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan nasional tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal

---

<sup>12</sup> Edward III dan Sharkansky, *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy* (San Fransisco: WH. Freeman & Co. Publisher, 1978), h. 2.

<sup>13</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 197.

<sup>14</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 35-36.

<sup>15</sup> Tilaar dan Nugroho, h. 36.

pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga karena pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.

### 3. Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diperoleh seorang individu dari masyarakat, mencakup adat istiadat, norma-norma yang berlaku, kepercayaan, serta keahlian yang diperoleh bukan dari hasil kreativitas sendiri melainkan merupakan warisan masa lalu yang didapat baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal.<sup>16</sup>

Pembangunan adalah semua upaya yang dilakukan dan direncanakan untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.<sup>17</sup> Pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu arah perubahan yang lebih baik menuju ke pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga mampu membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan sekitarnya dan membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri.<sup>18</sup>

Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai suatu aset bangsa dan dapat menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran tersebut menggambarkan tujuan utama dari pembangunan manusia, yaitu mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti nilai seperti dominasi dan proses non-developmental. Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan bahkan kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu

---

<sup>16</sup> Isna Zuriatina, "Pengaruh Pembangunan Kebudayaan Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 3, no. 1 (11 Maret 2020): h. 4.

<sup>17</sup> Zuriatina, h. 4.

<sup>18</sup> Zuriatina, h. 5.

perseorangan maupun kelompok, walaupun akal manusia merupakan unsur yang dominan dalam mengambil keputusan. Suatu kebijakan kadang kala lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. Hal ini bukanlah berarti bahwa suatu kebijakan tidak mengandung unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor rasional tersebut belum tercapai pada saat itu atau baru saja merupakan intuisi belaka.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan Fungsi Pendidikan Nasional adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sepak terjang kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar pada saat ini belum maksimal diperhatikan. Hal ini sebenarnya merupakan unsur penting karena Sekolah Dasar dilihat sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat menentukan arah pencapaian cita-cita bangsa.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni: a) Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. e) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika

mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi. e) Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya.<sup>19</sup>

Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Landasan yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan:

- 1) Dalam pembukaan (UUD 1945, antara lain : “ Atas berkat Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban d dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”<sup>20</sup>
- 2) Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

---

<sup>19</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>20</sup> Tawa, “Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar,” h. 111-113.

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

- 3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional pendidikan menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 yang berisi bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pendidikan hendaknya mewujudkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan sangat pluralistik, dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat secara khusus pendidikan bagi peserta didik.<sup>21</sup>

Pembangunan pendidikan tentunya harus bisa menjadi latar belakang terkait dengan indeks pembangunan manusia. Dalam indeks pembangunan manusia yang menjadi fokus dan harapan dari pembangunan dalam aspek pendidikan ini adalah munculnya sumber daya manusia

---

<sup>21</sup> Tawa, h. 114.

yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing. Contoh yang bisa diambil mengenai pembangunan di dalam aspek pendidikan adalah hadirnya banyak sekolah kejuruan yang memberikan pemahaman mengenai dunia kerja yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, dan juga mengenai bagaimana pembangunan pendidikan ini sebagai penggerak indeks pembangunan manusia yang ada di kota Bandung dapat berjalan dengan semestinya dan dapat peningkatan yang signifikan mengenai kualitas pembangunan manusia.<sup>22</sup>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang terdapat di masyarakat. Dimensi mendasar yang mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi mendasar yang ada di masyarakat tersebut memiliki pengertian sangat luas terkait banyak faktor yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam mengukur dimensi kesehatan, data yang digunakan adalah data angka harapan hidup dan kelahiran yang ada di suatu daerah. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan data dari indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang ada di suatu daerah. Adapun untuk mengukur dimensi kehidupan layak digunakan data indikator dari daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk menunjang kehidupan yang layak.<sup>23</sup>

Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIS) UNESCO. Dalam CDIS, terdapat tujuh dimensi sebagai tolak ukur, yaitu ekonomi, pendidikan, pemerintahan, partisipasi sosial, gender, komunikasi, dan warisan budaya. Ketujuh dimensi diturunkan ke dalam bentuk indikator, dimana masing-masing dimensi memiliki satu hingga lima indikator. Integrasi antara CDIS dengan Strategi Kebudayaan menghasilkan dimensi dan indikator baru yang dianggap sesuai dengan karakteristik kebudayaan di Indonesia. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Hasil dari penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga dapat dihasilkan

---

<sup>22</sup> Dendi Herdiansyah dan Poni Sukaesih Kurniati, "Pembangunan Sektor Pendidikan sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung," *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8, no. 1 (7 Juni 2020): h. 44.

<sup>23</sup> Herdiansyah dan Kurniati, h. 45.

perumusan kebijakan, strategi, dan program kebudayaan berbasis data empiris.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman budaya ini merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga. Hal ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Indonesia memiliki modal budaya yang kuat yang dapat dijadikan modal dasar percepatan pembangunan nasional. Terdapat tiga negara di kawasan Asia yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan yang dianggap telah berhasil melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai kebudayaan melalui proses modernisasi.<sup>24</sup> Dengan mengacu ke ketiga negara tersebut, Indonesia juga dapat melakukan akselerasi pembangunan kebudayaan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia juga terus menerus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa udara yang segar dalam pembangunan kebudayaan. Menurut UU tersebut, pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.<sup>25 26</sup>

## KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan hendaknya mewujudkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua. menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri.

---

<sup>24</sup> Gumanti Awaliyah, "Kebudayaan Bisa Jadi Modal Penggerak Pembangunan Nasional," *Republika* (blog), 2018.

<sup>25</sup> Citra Hennida dkk., "Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan China," *Global Strategis* 10, no. 2 (2016).

<sup>26</sup> Melina, "Peranan Budaya dalam Pembangunan Manusia Indonesia," *Dunia Ilmu* 2, no. 4 (2016).

Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implikasinya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Juga, melakukan perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Awaliyah, Gumanti. "Kebudayaan Bisa Jadi Modal Penggerak Pembangunan Nasional." *Republika* (blog), 2018.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1978.
- Edward III, dan Sharkansky. *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*. San Fransisco: WH. Freeman & Co. Publisher, 1978.
- Effendy, Onong Uchajana. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Hennida, Citra, Reza Akbar Felayati, Sri Harini Wijayanti, dan Alfionita Rizky Perdana. "Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan China." *Global Strategis* 10, no. 2 (2016).
- Herdiansyah, Dendi, dan Poni Sukaesih Kurniati. "Pembangunan Sektor Pendidikan sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8, no. 1 (7 Juni 2020).
- Melina. "Peranan Budaya dalam Pembangunan Manusia Indonesia." *Dunia Ilmu* 2, no. 4 (2016).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2017.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sauri, Sofyan. "Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu." *UPI Bandung*, 2008.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Suroto. "Kebijakan Pembangunan Pendidikannasional Indonesia dan Kendala yang Dihadapi sebagai Upaya Perbaikan dalam Rangka Mempersiapkan Warga Negara Muda yang Baik dan Cerdas." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (13 Mei 2016).

H. Ahmad Maki, Gunawan, Sofyan Sauri, Sri Handayani : Pola Hubungan Kebijakan dan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Tawa, Angelika Bule. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 2 (29 November 2019).

Tilaar, H.A.R, dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuriatina, Isna. "Pengaruh Pembangunan Kebudayaan Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 3, no. 1 (11 Maret 2020).